

LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA BONTANG

Untuk Periode yang Berakhir

30 Setember Tahun 2023

Bagian Anggaran 005.01.652080

(Badan Urusan Administrasi MA-RI)

Jl. Ir. H. Juanda No. 64 Bontang

Bontang - Kalimantan Timur 75311

**PENGADILAN AGAMA
BONTANG**



Untuk Periode yang Berakhir
Tanggal 30 September 2023
BAGIAN ANGGARAN 005.01

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pengadilan Agama Bontang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bontang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Bontang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bontang, 18 Oktober 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,



Yuri Adi Dharma S.Kom
NIP 198501172006041001

	Hal
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	7
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	11
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	26
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	30
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	35
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	38
F. Pengungkapan Penting Lainnya	39
VI. Lampiran dan Daftar	44

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

Jalan Awang Long No 69 Bontang Telp. (0548) 23001

Email : kantor.pabontang@gmail.com

BONTANG - 75311

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bontang, 18 Oktober 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,

Yuri Adi Dharma, S.Kom.
NIP. 19850117200604 1001



Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bontang Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0. atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp2.322.808.069 atau mencapai 76 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 3.076.445.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 September 2023.

Nilai Aset per 30 September 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 7.452.896.187 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 56.180.000 Aset Tetap (neto) sebesar Rp Rp 7.396.716.187

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 192.913.621 dan Rp 7.259.982.566.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2023 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah

beban adalah sebesar Rp 2.631.185.595 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(2.631.185.595). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 0 dan sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(2.631.185.595).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp 7.540.053.842 dikurangi Defisit- LO sebesar Rp(2.631.185.595) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 2.351.114.319 sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 30 September 2023 adalah senilai Rp 7.259.982.566.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA BONTANGLAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023 DAN 30 SEPTEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

UR AI AN	CATATAN	30 September 2023		% thd Angg	30 SEPTEMBER 2022	% thd Angg
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI	
PENDAPATAN						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	0.00	-	0.00
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	0.00	-	0.00
BELANJA	B.2.					
Belanja Pegawai	B.3	1.980.702.000	1.437.877.673	73.00	1.587.570.975	80.00
Belanja Barang	B.4	1,095.743.000	884.930.396	81.00	741.843.924	61.00
Belanja Modal	B.5	0	0	0	10.000,000	17.00
	B.6					
JUMLAH BELANJA		8,532,617,000	5,025,001,005	58.89	7,341,944,876	58.89

II. NERACA

PENGADILAN AGAMA BONTANG NERACA PER 30 SEPTEMBER 2023 DAN 30 SEPTEMBER 2022

(DalamRupiah)

Uraian	Catatan	30 September 2023	30 SEPTEMBER 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	56,000,000	-
Persediaan	C.10	180,000	-
Jumlah Aset Lancar		56,180,000	-
ASET TETAP			-
Tanah	C.14	2.042.591.548	2.042.591.548,000
Peralatan dan Mesin	C.15	2.521.691.978	2.489.341.978
Gedung dan Bangunan	C.16	9,635,599,000	9,635,599,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	3,427.109	3,427.109
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(3,016,032,216)	(2,824.506.361)
Jumlah Aset Tetap		7.396.716.187	7.555.892.042
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	4,950,000	4,950,000
Aset Lain-Lain	C.22	268.406.137	268.406.137
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(273.356.137)	(273.356.137)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
JUMLAH ASET		7.452.896.187	7.555.892.042
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Pihak Ketiga	C.25	136.913.621	15,838,200
Uang Muka dari KPPN		56000,000	-
JUMLAH KEWAJIBAN		192.913.621	15,838,200
EKUITAS DANA			
Ekuitas	C.31	7.259.982.566	7.540.053.842
JUMLAH EKUITAS DANA		7.259.982.566	7.540.053.842
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7.452.896.187	7.555.892.042

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA BONTANGLAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023 DAN 30 SEPTEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 September 2023	30 SEPTEMBER 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN			
		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1.540.725.294	1.698.815.022
Beban Persediaan	D.3	8.818.000	14.297.431
Beban Barang dan Jasa	D.4	551.264.659	530.688.538
Beban Pemeliharaan	D.5	285.948.992	213.497.499
Beban Perjalanan Dinas	D.6	56.946.545	36.270.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	187.482.105	178.012.096
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN			
		2.631.185.595	2.671.580.586
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL			
		(2.631.185.595)	(2.671.580.586)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	D.11	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			
		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA			
		(2.631.185.595)	(2.671.580.586)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNPB	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO			
		(2.631.185.595)	(2.671.580.586)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**PENGADILAN AGAMA BONTANGLAPORAN
PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023
DAN 30 SEPTEMBER 2022***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	30 September 2023	30 SEPTEMBER 2022
EKUITAS AWAL	E.1	7.540.053.842	7.555.992.496
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(2.631.185.595)	(2.671.580.586)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ATARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		-	-
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		-	-
LAIN-LAIN			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP	E.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.5	-	-
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.6	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN -- HIBAH MASUK/KELUAR	E.7	-	-
Jumlah Lain-Lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		2.351.114.319	2.544.919.649
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS		(280.071.276)	(126.660.937)
EKUITAS AKHIR	E.8	7.259.982.566	7.429.331.559

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Bontang

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Kantor Pengadilan Agama Bontang didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Nomor 232 /Pmk.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Instansi. Entitas berkedudukan di Jalan Awang Long No 69, Kota Bontang

Kantor Pengadilan Agama Bontang mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Pengadilan Agama Bontang berkomitmen dengan visi **"Terwujudnya Pengadilan Agama Bontang yang Agung"** Misi Pengadilan Agama Bontang adalah Misi Pengadilan Agama Bontang adalah

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama.
4. Meningkatkan Kredibilitas, dan Transparansi Pengadilan Agama Bontang

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Bontang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Bidang Kepaniteraan :

- Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.
- Meningkatkan administrasi perkara secara profesional, efisien dan efektif.
- Penguatan Akses Penyelesaian Perkara Permohonan identitas Hukum ;
- Pembatasan Perkara Kasasi
- Proses Berperkara yang Sederhana Cepat dan Biaya Ringan
- Penguatan Akses Peradilan serta Meningkatkan pengawasan dan menciptakan kondisi kerja yang harmonis.
- Penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai masalah hukum yang berlaku di Pengadilan Agama.

2. Bidang Kesekretariatan :

- Meningkatkan Pelaksanaan Pembinaan bagi aparat Tenaga Teknis
- Meningkatkan disiplin pegawai dan etos kerja dalam rangka mengoptimalkan 5 (hari) kerja sesuai dengan kinerja aparat peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung.
- Menertibkan administrasi data kepegawaian dengan mengaplikasikan Sistem Informasi kepegawaian (SIMKEP)
- Meningkatkan Hasil Penelitian dan Sumber daya manusia Mahkamah Agung yang berkualitas
- Meningkatkan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal

- Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Sumber Daya Manusia Keuangan dan Aset
- Menertibkan prosedur usul kenaikan pangkat tepat waktu.
- Meningkatkan SDM pegawai.
- Meningkatkan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Meningkatkan penyusunan anggaran tahun yang akan datang.
- Melaksanakan persuratan dan perlengkapan kantor.
- Melaksanakan administrasi perpustakaan secara tertib

*Pendek
atan
Penyus
unan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Agama Bontang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Bontang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca,

Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Bontang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Bontang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bontang adalah sebagai berikut:

*Pendap
atan- LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendap
atan-LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset

a. Aset Lancar

Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai

berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung	50%

	sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat MusikModern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pertama Kali

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pertama Kali

Mulai Tahun 2010 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akruaI sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 30 SEPTEMBER 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akruaI. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akruaI pada Tahun 2022 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Pengadilan Agama Bontang* tidak ada mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) **Realisasi Pendapatan**.

Realisasi

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp0. atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Pengadilan Agama Bontang terdiri dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan negara bukan pajak	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Realisasi
Pendapatan
Rp0*

B.1 Pendapatan
Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2023 tidak mengalami penurunan/kenaikan 0 persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada Kantor Pengadilan Agama Bontang

*Perbandingan Realisasi Pendapatan per 30 September 2023
dan 30 SEPTEMBER 2022*

*Realisasi
Belanja Negara
Rp5.025.001.005*

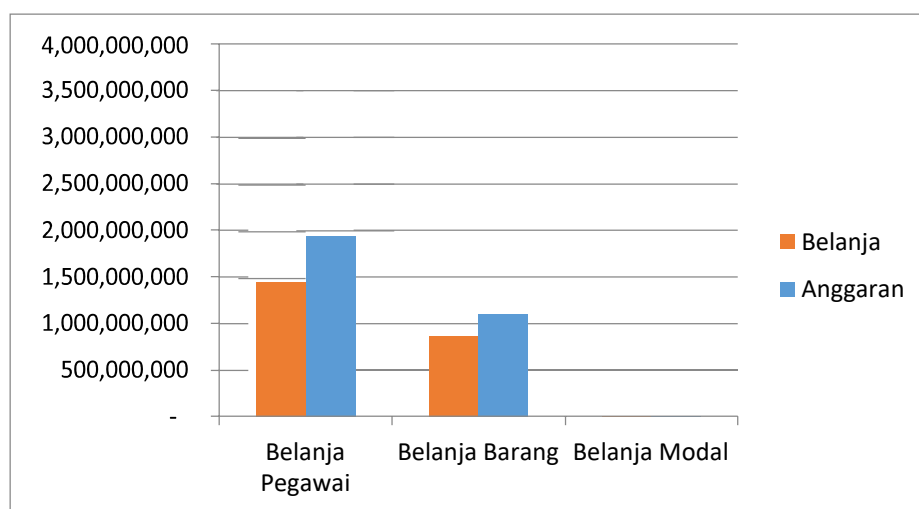
B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2023 adalah sebesar Rp5.025.001.005 atau 58.92% dari anggaran belanja sebesar Rp8.532.617.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% RealAngg.
Belanja Pegawai	1.980.702,000	1.437.877.673	73.00
Belanja Barang	1.095.743,000	884.930.396	81.00
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Kotor	3.076.445.000	2.322.808.069	76.00
Pengembalian	-	0	0
Jumlah	3.076.445.000	2.322.808.069	76.00

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja TA 2023 mengalami Penurunan sebesar 0,80% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena DIPA anggaran Tahun 2023 terdapat biaya perjalanan dinas belum bisa direalisasikan karena kondisi pandemi dan masih tersisa 3 (tiga) Bulan.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1.437.877.673	1.587.570.975	(7.00)
Belanja Barang	884.930.396	741.843.924	20,00
Belanja Modal	0	0	-
Jumlah	2.322.808.069	2.322.808.069	(6.00)

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp 1.437.877.673

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.1.437.877.673 dan Rp 1.587.570.975 Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami penurunan 7.00% dari Realisasi Belanja Barang TA 2022.

Belanja Barang
Rp 884.930.396

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp, 884.930.396 dan Rp 741.843.924. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan 20.00% dari Realisasi Belanja Barang TA 2022.

Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan belanja Kebutuhan sehari hari pegawai yang di harus dipenuhi di Pengadilan Agama Bontang di Tahun 2023

Perbandingan Belanja Barang TA 2022 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	892,004,803	1,019,172,218	(0.87)
Belanja Barang Non Operasional	21,702,393	46,925,000	2.87
Jumlah Belanja Kotor	913,707,196	1,066,097,218	2.00
Pengembalian Belanja	(2,600,286)	-	
Jumlah Belanja	911,106,910	1,066,097,218	2.00

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp0

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp10.000.000 Realisasi Modal TA 2023 tidak mengalami penurunan 100% dari Realisasi Belanja Modal Barang TA 2022.

Hal ini dikarenakan tidak adanya pagu belanja Modal yang diperoleh Pengadilan Agama Bontang Tahun 2023.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp56.000.000*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2023 sebesar Rp 56.000.000.

*Barang Persediaan
Rp180.000*

C.2 Barang Persediaan

Terdapat Nilai Persediaan per 30 September 2023 sebesarRp 180.000.

*Tanah
Rp2.042.591.548*

C.3 Tanah

Terdapat Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Bontang per 30 September 2023 sebesar Rp2.042.591.548.

*Peralatan dan
Mesin
Rp2.521.691.978*

C.4 Peralatan dan Mesin

Terdapat Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per30 September 2023 sebesar Rp2.521.691.978

*Gedung dan
Bangunan
Rp5.845.037.768*

C.5 Gedung dan Bangunan

Terdapat Nilai Gedung dan Bangunan per 30 September2023 sebesar Rp5.845.037.768.

*Aset Tetap Lainnya
Rp3,427.109*

C.6 Aset Tetap Lainnya

Terdapat.Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 September 2023 sebesar Rp3,427.109.

*Akumulasi
Penyusutan
Peralatan dan Mesin
Rp (2.170.857.546)*

C.7 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Terdapat Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 30September 2023 sebesar Rp(2,170.857.546).

*Akumulasi
Penyusutan Gedung
dan Bangunan
Rp (2.170.857.546)
Aset Tak Berwujud
Rp4.950.000*

C.8 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Terdapat Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 30 September 2023 sebesar Rp(2,170.857.546).

C.9 Aset Tak Berwujud

Terdapat Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 September 2023 sebesar Rp4.950.000

C.10 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan

*Aset Tetap yang tidak
digunakan dalam
operasi Pemerintahan
Rp.268.406.137*

Terdapat Saldo Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan per 30 September 2023 sebesar Rp 268.406.137

*Akumulasi
Penyusutan Gedung
dan Bangunan
Rp(268.406.137)*

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan

Terdapat Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan per 30 September 2023 sebesar Rp.(268.406.137)

*Akumulasi Amortisasi
Aset Tak Berwujud
Rp(4.950.000)*

C.12 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Terdapat Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 30 September 2023 sebesar Rp.(4.950.000)

*Belanja Pegawai yang
masih harus
dibayarkan
Rp (115.921.621)*

C.13 Belanja Pegawai yang Masih harus dibayarkan

Terdapat Saldo Belanja Pegawai yang Masih harus dibayarkan per 30 September 2023 sebesar Rp.(115.921.621)

*Belanja Barang yang
masih harus
dibayarkan
Rp (20.992.000)*

C.14 Belanja Barang yang Masih harus dibayarkan

Terdapat Saldo Belanja Barang yang Masih harus dibayarkan per 30 September 2023 sebesar Rp.(20.992.000)

*Belanja Dibayar di
Muka Rp0*

C.15 Beban Dibayar di Muka

Tidak terdapat Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 30 September 2023.

<i>Tagihan TP/TGR Rp0</i>	C.16 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan GantiRugi (TP/TGR)	Tidak terdapat Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 September 2023
<i>Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0</i>	C.17 Pendapatan	Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima per30 September 2023.
<i>Tagihan Penjualan Angsuran Rp0</i>	C.18 Tagihan Penjualan Angsuran	Tidak Terdapat Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 September 2023.
<i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp0 Jalan,Jaringan dan Irigasi Rp0</i>	C.19 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	Tidak terdapat Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 September 2023
<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0</i>	C.21 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	Tidak terdapat Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30September 2023
<i>Pendapatan yang Ditangguhkan Rp0</i>	C.22 Pendapatan yangDitangguhkan	Tidak terdapat Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30September 2023
<i>Aset Lain-Lain Rp0</i>	. C.23 Aset Lain-Lain	Tidak terdapat Saldo Aset Lain-lain per 30 Srptember 2023.
<i>Utang kepada Pihak Ketiga Rp0</i>	C.24 Utang kepada Pihak Ketiga	Tidak terdapat Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September 2023

Pendapatan yang Ditangguhkan

Rp0

Pendapatan Diterima di Muka
Rp0

Beban yang Masih Harus Dibayar
Rp0

Ekuitas

Rp26,460,048,623.

C.25 Pendapatan yang Ditangguhkan

Tidak terdapat Nilai Pendapatan Ditangguhkan per 30 September 2023

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Tidak terdapat Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 September 2023

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Tidak terdapat Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 September 2023

C.28 Ekuitas

Terdapat Ekuitas per 30 September 2023 sebesar Rp26,460,048,623.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Terdapat Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023. dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak	-	-	-

Pendapatan PNBPNP
Rp0

D.2 Beban Pegawai

Terdapat Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 dan 2022 masing masing sebesar Rp1.540.725.294 dan 1.698.815.022

Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pegawai	1.540.725.294	1.698.815.022	9.306

Beban Pegawai
Rp.1.540.725.294

Beban Persediaan
Rp8.818.000

D.3 Persediaan

Terdapat Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 sebesar Rp.8.818.000

Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan	8.818.000	14.297.431	(38.325)

Beban Barang dan
Jasa Rp.551.264.659

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp. 551.264.659 dan Rp.530.688.538 Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban barang dan Jasa	551.264.659	530.688.538	3.87

Beban Pemeliharaan
Rp285.948.992

D.5 Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp. 285.948.992 dan Rp.213.497.499 Beban Pemeliharaan terdiri dari beban Pemeliharaan beban yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
pemeliharaan	285.948.992	213.270.000	33.936

Beban Perjalanan
Dinas Rp56.946.545

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut: 56.946.545 dan Rp.36.270.000 Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	56.946.545	36.270.000	57.007

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Tidak terdapat Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023

Beban Bunga Rp0

D.8 Beban Bunga

Tidak Terdapat Beban Bunga Tahun 2023

Beban Subsidi Rp.0

D.9 Beban Subsidi

Tidak Terdapat Beban Subsidi Tahun 2023

Beban Hibah Rp.0

D.10 Beban Hibah

Tidak Terdapat Beban Hibah Tahun 2023

Beban Bantuan Sosial Rp.0

D.11 Beban Bantuan Sosial

Tidak Terdapat Beban Hibah Tahun 2023

Beban Penyusutandan Amortisasi Rp.187.482.105

D.12 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Terdapat Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 sebesar Rp.187.482.105

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2023

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp.(2.631.185.595)

D.11 Kegiatan Non Operasional

Terdapat Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 sebesar Rp.(2,631.185.595)

Pos Luar Biasa Rp0

D.12 Pos Luar Biasa

Tidak terdapat Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Terdapat Nilai ekuitas pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp7.540.053.842

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.(2.631.185.595) dan Rp(5.720.949.442), Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas

Tidak terdapat Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas untuk Tahun 2023

Koreksi Nilai Aset Rp0

E.4 Penyesuaian Nilai Aset Tetap

Tidak terdapat Koreksi atas Nilai Perolehan Aset Tetap untuk Tahun 2023.

E.5 Selisih Revaluasi Aset

Tidak terdapat Selisih Revaluasi Aset untuk Tahun 2023

E.6 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Tidak terdapat Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk Tahun 2023

E.7 Lain-lain

Tidak terdapat Informasi Lain-lain untuk Tahun 2023

E.8 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar entitas pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.2.51.114.319 dan Rp2.544.919.649.

E.9 Transaksi Ekuitas Akhir

Nilai Transaksi Ekuitas Akhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.7.259.982.566 dan Rp.7.429.331.559.

Ekuitas Awal

Rp7.540.056.842

Defisit LO

Rp(2.631.185.595).

*Koreksi yang menambah/
mengurangi Ekuitas
Rp0.*

Penyesuaian Nilai Aset

Tetap Rp0

*Selisih Revaluasi Aset
Rp0*

*Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi*

Lain-lain Rp0

*Transaksi Antar
Entitas Rp.*

2.351.114.310

Ekuitas Akhir

Rp.7.259.982.566

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.1. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak terdapat Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual pada Tahun 2022.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran adalah Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 653246520801000 atas Nama BPG 046 PENGADILAN AGAMA BONTANG dengan Surat izin rekening dari Kementerian Keuangan Nomor S-2732/WPB.12/KP.046/2020 tanggal 16 Oktober 2020

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Tidak Terdapat informasi Pengelolaan Uang Titipan Pada DIPA 652080.

F.2.5. Revisi DIPA dan POK

Terdapat Revisi DIPA per 30 September 2023. Antara lain adalah dapat di jabarkan sebagai berikut :

1. Revisi DIPA tanggal 09 Juni 2023 dalam rangka Revisi Administrasi dengan cara Pemuktahiran POK dengan pertimbangan Pengoptimalisasian penggunaan Anggaran yang terbatas;
2. Revisi DIPA tanggal 10 Juli 2023 dalam rangka Revisi Administrasi dan Ralat Rencana penarikan dana halaman III DIPA dengan Cara Pemutakhiran POK dengan pertimbangan Penyesuaian Halaman III DIPA dan Pengoptimalisasian penggunaan Anggaran yang terbatas
3. Revisi DIPA tanggal 08 Agustus 2023 dalam rangka Revisi Administrasi dengan Cara Pemuktahiran POK dengan pertimbangan Pengoptimalisasi penggunaan Anggaran yang terbatas
4. Revisi DIPA tanggal 12 September 2023 dalam rangka Revisi Administrasi dengan cara Pemuktahiran POK dengan pertimbangan Pengoptimalisasi penggunaan Anggaran yang terbatas
5. Revisi DIPA tanggal 09 Oktober 2023 dalam rangka Revisi Administrasi dengan cara Ralat rencana penarikan dana Halaman III DIPA dengan pertimbangan Penyesuaian Rencana Penarikan Halaman III DIPA

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak Terdapat Ralat SPM pada sampai dengan tanggal 30 September 2023.

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Selama Tahun 2023 per 30 September 2023 terjadi perubahan pada Tim Pengelola DIPA Pengadilan Agama Bontang yaitu masing masing adalah :

1. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bontang pada awalnya Tim Pengelola DIPA Nomor: W17-A6/123/KU.01/1/2023. tanggal 03 Januari 2023 dengan rincian sebagai berikut :
Kuasa Pengguna Anggaran : Ana Syuryaningrum, S.H.I.
Pejabat Pembuat Komitmen : Ana Syuryaningrum, S.H.I..
Dijabat oleh PLT Sekretaris dikarenakan belum adanya Pejabat Sekretaris yang Definitif
Pejabat Penandatanganan /Penguji SPM:Fathul Majid, S.H.I.
Bendahara Pengeluaran :Norma Ayu Anggraini . A.Md
Bendahara Penerimaan : Iwan Arianto, S.H
Pejaba Pembuat Anggaran Belanja Pegawai:Nurhasanah, A.Md.,S.H
Staf Pengelola : Awaluddin Nur, S. H.I
2. Setelah ada Pejabat Sekretaris Definitif maka Dibentuk Kembali Tim Pengelola Dipa Pengadilan Agama Bontang Nomor W17-A6/613/KU.01/V/2023. tanggal 03 Mei 2023
Dengan rincian Sebagai Berikut:
Kuasa Pengguna Anggaran :Yuri Adi Dharma, S.Kom. Pejabat Pembuat Komitmen : Yuri Adi Dharma, S.Kom.
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM:AnaSyuryaningrum,S.H.
IBendahara Pengeluaran :Norma Ayu Anggraini . A.Md
Bendahara Penerimaan : Iwan Arianto, S.H
Pejaba Pembuat Anggaran Belanja Pegawai: Fathul Majid, S.H.I
Staf Pengelola : Awaluddin Nur, S. H.I

VI. LAMPIRAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA BONTANG 652080

Tgl Data : 23/10/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 23/10/23 10:13 AM
Halaman : 2
lap_ira_face_satker_komparatif

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	3,076,445,000	2,322,808,069	753,636,931	76	3,253,691,000	2,339,414,899	914,276,101	70
C	PEMBIAYAAN				0				0

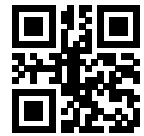
Keterangan :

FINAL

BONTANG, 23 Oktober 2023
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

YURI ADI DHARMA
198501172006041001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (652080) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tgl Data : 23/10/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 23/10/23 10:13 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	56,000,000	0	56,000,000	0.00
Persediaan	180,000	0	180,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	56,180,000	0	56,180,000	
ASET TETAP				
Tanah	2,042,591,548	2,042,591,548	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,521,691,978	2,489,341,978	32,350,000	1.30
Gedung dan Bangunan	5,845,037,768	5,845,037,768	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	3,427,109	3,427,109	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,016,032,216)	(2,824,506,361)	(191,525,855)	6.78
JUMLAH ASET TETAP	7,396,716,187	7,555,892,042	(159,175,855)	(2.11)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	4,950,000	4,950,000	0	0.00
Aset Lain-lain	268,406,137	268,406,137	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(273,356,137)	(273,356,137)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	7,452,896,187	7,555,892,042	(102,995,855)	(1.36)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	136,913,621	15,838,200	121,075,421	764.45
Uang Muka dari KPPN	56,000,000	0	56,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	192,913,621	15,838,200	177,075,421	1,118.03
JUMLAH KEWAJIBAN	192,913,621	15,838,200	177,075,421	1,118.03
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	7,259,982,566	7,540,053,842	(280,071,276)	(3.71)
JUMLAH EKUITAS	7,259,982,566	7,540,053,842	(280,071,276)	(3.71)
JUMLAH EKUITAS	7,259,982,566	7,540,053,842	(280,071,276)	(3.71)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7,452,896,187	7,555,892,042	(102,995,855)	(1.36)

Keterangan :
FINAL

BONTANG, 23 Oktober 2023
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

YURI ADI DHARMA
198501172006041001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (652080) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tgl Data : 23/10/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 23/10/23 10:14 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	56,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	180,000	0
0.0	131111	Tanah	2,042,591,548	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,521,691,978	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	5,845,037,768	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	3,427,109	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,170,857,546
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	845,174,670
0.0	162151	Software	4,950,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	268,406,137	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	268,406,137
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	4,950,000
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	115,921,621
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	20,992,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	56,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,322,808,069
0.0	313221	Transfer Masuk	0	28,306,250
0.0	391111	Ekuitas	0	7,540,053,842
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	674,118,740	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	11,635	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	52,973,518	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	18,384,684	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	20,880,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	525,120,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	58,898,537	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	45,552,180	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	91,476,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	8,760,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	44,550,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	441,511,127	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	671,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	39,808,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,646,500	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	7,268,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,997,052	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	2,579,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	54,783,980	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	189,015,595	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (652080) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tgl Data : 23/10/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 23/10/23 10:14 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	96,933,397	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	56,946,545	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	121,040,793	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	66,441,312	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	8,818,000	0
JUMLAH			13,373,470,135	13,373,470,135

Keterangan :

FINAL

BONTANG, 23 Oktober 2023

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

YURI ADI DHARMA

198501172006041001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (652080) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tgl Data : 23/10/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 23/10/23 10:15 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	2,322,808,069
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	617,046,640	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10,757	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	48,257,928	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	16,829,822	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	18,870,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	486,660,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	55,481,030	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	41,641,500	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	104,550,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	8,030,000	0
3.0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	40,500,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	422,652,827	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	671,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	39,808,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,646,500	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	7,268,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	8,998,000	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	3,312,302	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	2,894,250	0
3.0	522141	Belanja Sewa	54,783,980	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	189,015,595	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	96,933,397	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	56,946,545	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	4
JUMLAH			2,322,808,073	2,322,808,073

Keterangan :

FINAL

BONTANG, 23 Oktober 2023

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

YURI ADI DHARMA

198501172006041001

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (652080) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tgl Data : 23/10/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 23/10/23 10:43 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	1,540,725,294	1,698,815,022	(158,089,728)	(9.306)
Beban Persediaan	8,818,000	14,297,431	(5,479,431)	(38.325)
Beban Barang dan Jasa	551,264,659	530,688,538	20,576,121	3.877
Beban Pemeliharaan	285,948,992	213,497,499	72,451,493	33.936
Beban Perjalanan Dinas	56,946,545	36,270,000	20,676,545	57.007
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (652080) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tgl Data : 23/10/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 23/10/23 10:43 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	187,482,105	178,012,096	9,470,009	5.32
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	2,631,185,595	2,671,580,586	(40,394,991)	(1.512)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(2,631,185,595)	(2,671,580,586)	40,394,991	(1.512)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(2,631,185,595)	(2,671,580,586)	40,394,991	(1.512)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(2,631,185,595)	(2,671,580,586)	40,394,991	(1.512)

Keterangan :

FINAL

BONTANG, 23 Oktober 2023

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

YURI ADI DHARMA

198501172006041001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
 SATUAN KERJA : (652080) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tgl Data : 23/10/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 23/10/23 10:11 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	7,540,053,842	7,555,992,496	(15,938,654)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2,631,185,595)	(2,671,580,586)	40,394,991	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2,351,114,319	2,544,919,649	(193,805,330)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(280,071,276)	(126,660,937)	(153,410,339)	-
EKUITAS AKHIR	7,259,982,566	7,429,331,559	(169,348,993)	-

Keterangan :

FINAL

BONTANG, 23 Oktober 2023

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

YURI ADI DHARMA

198501172006041001

LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA BONTANG

Untuk Periode yang Berakhir

30 Setember Tahun 2023

Bagian Anggaran 005.04.652081

(Badan Peradilan Agama MA-RI)

Jl. Awang Long No 69 Bontang

Kota Bontang - Kalimantan Timur 75311

**PENGADILAN AGAMA
BONTANG**



Untuk Periode yang Berakhir
Tanggal 30 September 2023
BAGIAN ANGGARAN 005.01

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pengadilan Agama Bontang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bontang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Bontang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bontang, 18 Oktober 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,



Yuri Adi Dharma S.Kom
NIP 198501172006041001

	Hal
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	7
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	11
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	26
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	30
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	35
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	38
F. Pengungkapan Penting Lainnya	39
VI. Lampiran dan Daftar	44

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

Jalan Awang Long No 69 Bontang Telp. (0548) 23001

Email : kantor.pabontang@gmail.com

BONTANG - 75311

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bontang, 18 Oktober 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,

Yuri Adi Dharma, S.Kom.
NIP. 19850117200604 1001



Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bontang Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0. atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan- LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp.47.000.000 atau mencapai 76 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.62.000.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 September 2023.

Nilai Aset per 30 September 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 33.164.900 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.33.164.900 Aset Tetap (neto) sebesar Rp Rp0

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.38.164.900 dan Rp.(5.000.000).

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2023 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban adalah

sebesar Rp.53.467.910 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(8.280.410) Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit adalah Rp 0 dan Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp(8.280.410) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(8.280.410).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Surplus/Defisit- LO sebesar Rp(8.280.410) kemudian Kenaikan/penurunan Ekuitas senilai Rp(5.000.000) sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 30 September 2023 adalah senilai Rp.(5000.000).

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA BONTANGLAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023 DAN 30 SEPTEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 September 2023		% thd Angg	30 SEPTEMBER 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	53.448.000-	45.184.500-	85.00	50.835.500
JUMLAH PENDAPATAN		53.448.000-	45.184.500-	85.00	50.835.500
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	0	0	0	0
Belanja Barang	B.4	62.000.000	47.000.000	7600	44.500.000
Belanja Modal	B.5	0	0	0	0
	B.6				
JUMLAH BELANJA		62.000.000	47.000.000	7600	44.500.000

II. NERACA

PENGADILAN AGAMA BONTANG NERACA PER 30 SEPTEMBER 2023 DAN 30 SEPTEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	30 September 2023	30 SEPTEMBER 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas lainnya dan setara KAs	C.1	33.164.900	-
Persediaan	C.10	0	0
Jumlah Aset Lancar		33.164.900	0
JUMLAH ASET		26,496,048,623	0
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Pihak Ketiga	C.25	33.164.900-	0
Uang yang belum ditagihkan		5.000.000	0
JUMLAH KEWAJIBAN		38.164.900	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.31	(5.000.000)	0
JUMLAH EKUITAS		(5.000.000)	0
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		33.164.900	0

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA BONTANG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023 DAN 30 SEPTEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 September 2023	30 SEPTEMBER 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	45.187.500	50.635.500
JUMLAH PENDAPATAN		45.187.500	50.635.500
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	3.267.910	900.000
Beban Barang dan Jasa	D.4	40.000.000	38.000.000
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	10.200.000	9.600.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		53.467.910	48.500.000
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(8.280.410)	2.135.500
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	D.11	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(8.280.410)	2.135.500
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNBP	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(8.280.410)	2.135.500

IV.LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA BONTANG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023 DAN 30 SEPTEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 September 2023	30 SEPTEMBER 2022
EKUITAS AWAL	E.1	0	0
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(8.280.410)	2.135.500
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		3.280.410	(5.217.500)
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS		(5.000.000)	(3.082.000)
EKUITAS AKHIR	E.8	(5.000.000)	(3.082.000)

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Bontang

Dasar Kantor Pengadilan Agama Bontang didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Hukum Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Entitas Entitas berkedudukan di Jalan Ir. Juanda No. 64 Kelurahan Air Putih, Kota Bontang

dan Kantor Pengadilan Agama Bontang mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Rencana

Strategis

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Pengadilan Agama Bontang berkomitmen dengan visi **"Terwujudnya Pengadilan Agama Bontang yang Agung"** Misi Pengadilan Agama Bontang adalah Misi Pengadilan Agama Bontang adalah:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama.
 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Hukum yang moderen dan berkeadilan.
 3. Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Sistem Administrasi Perkara di Pengadilan Agama.
 4. Meningkatkan Kredibilitas, Transparansi dan
 5. Professionalitas Operatur Pengadilan Agama Bontang.
- Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan
6. Agama Bontang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Bidang Kepaniteraan :

- Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.
- Meningkatkan administrasi perkara secara profesional, efisein dan efektif.
- Menertibkan administrasi perkara dengan polabindalmin.
- Menertibkan administrasi keuangan perkara.
- Meningkatkan pengawasan dan menciptakan kondisi kerja yang harmonis.
- Penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai masalah hukum yang berlaku di Pengadilan Agama

2. Bidang Kesekretariatan :

- Meningkatkan disiplin pegawai dan etos kerja dalam rangka mengoptimalkan 5 (hari) kerja sesuai dengan kinerja aparat peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung.
- Menertibkan administrasi data kepegawaian dengan mengaplikasikan Sistem Informasi kepegawaian (SIMKEP)
- Menertibkan prosedur usul kenaikan pangkat tepat waktu.
- Meningkatkan SDM pegawai.
- Meningkatkan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Meningkatkan penyusunan anggaran tahun yang akan datang.
- Melaksanakan persuratan dan perlengkapan kantor.
- Melaksanakan administrasi perpustakaan secara tertib.

*Pendek
atan
Penyus
unan
Laporan
Keuangan*

A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Agama Bontang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Bontang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Bontang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.1. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Bontang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

*Pendapatan-
LRA*

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bontang adalah sebagai berikut:

(1)Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat bertanggungjawab atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung	50%
	sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam. Pengeluaran nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barangbercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpamemperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat MusikModern)	4 tahun

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

*Piutang
Jangka
Panjang*

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
(TPA)*

d. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA),

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

*Aset
Lainnya*

e Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. angka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

K
e
w

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas

(6) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(7) Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pertama Kali

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI PertamaKali

Mulai Tahun 2010 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akruaI sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 30 SEPTEMBER 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akruaI. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akruaI pada Tahun 2022 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Pengadilan Agama Bontang* tidak ada mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

*Realisasi
Pendapatan
Rp45.187.500*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp45.187.500. atau mencapai 85 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp53.448.800. Pendapatan Pengadilan Agama Bontang terdiri dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan negara bukan pajak	45.187.500-	53.448.000-	85.00-

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2023 tidak mengalami Penurunan 15 persen dibandingkan TA 2022.

Perbandingan Realisasi Pendapatan per 30 September 2023 dan 30 SEPTEMBER 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak	45.187.500-	50.635.500-	(15.00)-
Jumlah	-	-	-

Realisasi

Belanja Negara

Rp47.000.000

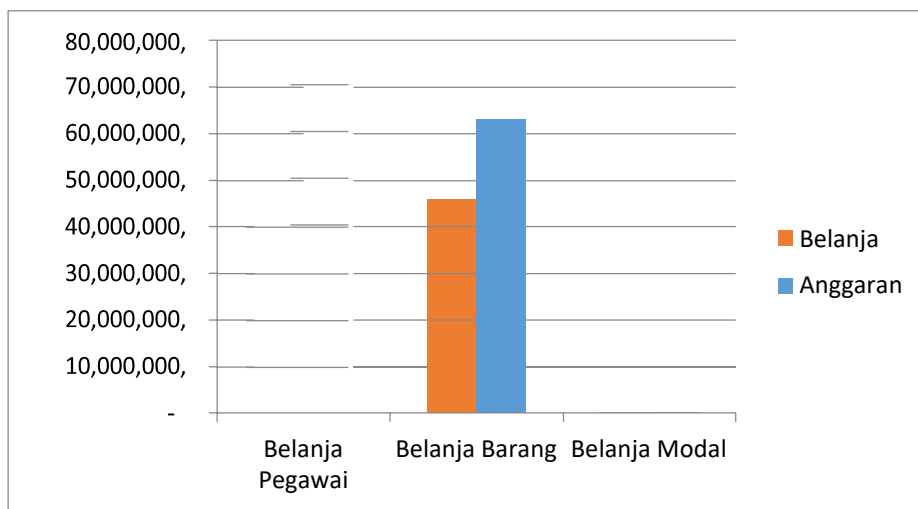
B2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2023 adalah sebesar Rp 47.000.000 atau 76% dari anggaran belanja sebesar Rp62.000.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% RealAngg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	62.000,000	47.000.000	76.00
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	62.000,000	47.000.000	76.00

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik Realisasi Belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,20% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.



Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	47.000.000	44.500.000	20,00
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	47.000.000	44.500.000	20,00

Belanja Pegawai **B.2 Belanja Pegawai** *Rp0*

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0 Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami penurunan 0% dari Realisasi Belanja Barang TA 2022.

Belanja Barang *Rp.47.000.000*

B.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp,47.000.000 dan Rp44.500.000. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan 20.00% dari Realisasi Belanja Barang TA 2022.

Perbandingan Belanja Barang TA 2022 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	47,000,000	44.500.000	20.00

Belanja Modal *Rp0*

B3 Belanja Modal

DRealisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022 adalah masing- masing sebesar Rp.0 dan Rp0 Realisasi Modal TA 2023 tidak mengalami penurunan/kenaikan 0% dari Realisasi Belanja Modal Barang TA 2022 Hal ini hanya terdapat penurunan pagu belanja barang atau menurunnya anggaran Dipa Belanja Modal yang diperoleh Pengadilan Agama Bontang Tahun 2023.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp33.164.900*

C.1 Kas di Bendahara Penerimaan

Terdapat Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 September 2023 sebesar Rp33.164.900.

*Dana Pihak
Ketiga*

C.2 Dana Pihak Ketiga

Terdapat Saldo Dana Pihak Ketiga per 30 September 2023 sebesar Rp33.164.900

*Utang kepada
Pihak Ketiga*

C.3 Utang Kepada Pihak Ketiga

Terdapat Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 30 September 2023 sebesar Rp33.164.900

*Utang Yang
Belum
Ditagihkan Rp
5.000.000*

C.4 Utang yang belum ditagihkan

Terdapat Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 September 2023. sebesar Rp5.000.000

*Ditagihkan ke
Entitas lain
Rp(47.000.000)*

C.5 Ditagihkan ke Entitas lain

Terdapat Saldo Ditagihkan ke Entitas lain Ekuitas per 30 September 2023. sebesar Rp(47.000.000)

*Diterima Entitas
lain
Rp(45.000.000)*

C.6 Diterima Entitas lain

Terdapat Saldo Diterima Entitas lain per 30 September 2023 sebesar Rp(47.000.000)

*Tranfer Masuk
Rp(1.467.910)*

C.7 Tranfer Masuk

Terdapat Saldo Tranfer Masuk Diterima Entitas lain per 30 September 2023 sebesar Rp(1.467.910)

*Pendapatan
Uang
Meja(Leges)dan
Upah pada
Panitera Badan
Peradilan
Rp(3.190.000)*

**C.8 Pendapatan Uang Meja(Leges)dan Upah pada Panitera
Badan Peradilan**

Terdapat Pendapatan Uang Meja(Leges)dan Upah pada Panitera Badan Peradilan Pengadilan Agama Bontang per 30 September 2023 sebesar Rp(3.190.000)

*Beban Jasa
Konsultasi
Rp40.000.000*

C.9 Beban Jasa Konsultasi

Terdapat Beban Jasa Konsultasi per30 September 2023 sebesar Rp40.000.000

*Beban Perjalanan
Dinas Dalam
Kota
Rp.10.200.000*

C.10 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

Terdapat Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota per 30 September2023 sebesar Rp10.200.000

*Beban Persediaan
Konsumsi
Rp3.267.910*

C.11 Beban Persediaan Konsumsi

Terdapat Beban Persediaan Konsumsi per 30September 2023. sebesar Rp3.267.910

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Terdapat Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023. Dan 2022 adalah sebesar Rp45.187.500 dan Rp50.635.500. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak	45.187.500-	50.635.500-	(10.759)-
Jumlah	-	-	-

D.2 Beban Pegawai

Terdapat Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 sebesar Rp0

D.3 Beban Persediaan

Terdapat Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 sebesar Rp.3.267.910

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2018 adalah masing-masing Rp.658,367,914 dan Rp499,237,772. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban barang dan Jasa	40.000.000	38.000.000	5.263

*Beban
Pemeliharaan*

Rp0

*Beban Perjalanan
Dinas Rp.10.200.000*

D.5 Beban Pemeliharaan

Terdapat Beban Pemeliharaan Tahun 2023 sebesar Rp0

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 10.200.000 dan Rp.9.600.000 Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	21,702,393	32,367,000	-
Jumlah	21,702,393	32,367,000	-

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Tidak terdapat Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Tidak Terdapat Beban Bantuan Sosial Tahun 2023

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp225,426,982*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Terdapat Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 sebesar Rp225,426,982

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0.*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2023.

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp(8.280.410)*

D.11 Kegiatan Non Operasional

Terdapat Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 sebesar Rp08.280.410)(

*Pos Luar Biasa
Rp0*

D.12 Pos Luar Biasa

Tidak terdapat Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp0.*

E.1 Ekuitas Awal

Terdapat Nilai ekuitas pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp0.

*Defisit LO
Rp(8.280.410).*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.(8.280.410) dan Rp2.135.500 Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Transaksi
Antar Entitas
Rp3.280.410*

E.3 Transaksi Antar Entitas

Terdapat Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp3.280.410

Kenaikan/penurunan EKUITAS **E.4 Kenaikan/penurunan EKUITAS**

Rp(5.000.000) Terdapat Kenaikan/Penurunan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar *Rp(5.000.000)*

EKUITAS Akhir **E.5 Ekuitas Akhir**

Koreksi Atas Pendapatan Terdapat Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp. (5.000.000)
Rp(5.000.000)

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.1. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak terdapat Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual pada Tahun 2022.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran adalah Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0082-01-000074-308 dengan Surat izin rekening dari Kementerian Keuangan Nomor S-0568/WPB.020/KP.046/2015 tanggal 25 Februari 2015

F.2.4. Revisi DIPA dan POK

Terdapat Revisi DIPA per 30 September 2023. yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Revisi DIPA tanggal 10 Juli 2023 dalam rangka Revisi Administrasi dengan cara Ralat rencana Penarikan dan Halaman III DIPA dengan Pertimbangan Penyesuaian Rencana Penarikan Halaman III DIPA

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak Terdapat Ralat SPM pada periode pada tanggal 30 September 2023.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Selama Tahun 2023 per 30 September 2023 terjadi perubahan pada Tim Pengelola DIPA Pengadilan Agama Bontang yaitu masing masing adalah :

1. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bontang pada awalnya Tim Pengelola DIPA Nomor: W17-A6/123/KU.01/1/2023. tanggal 03 Januari 2023 dengan rincian sebagai berikut :
Kuasa Pengguna Anggaran : Ana Syuryaningrum, S.H.I. Pejabat Pembuat Komitmen : Ana Syuryaningrum, S.H.I..
Dijabat oleh PLT Sekretaris dikarenakan belum adanya Pejabat Sekretaris yang Definitif
Pejabat Penandatanganan /Penguji SPM:Fathul Majid, S.H.I.
Bendahara Pengeluaran :Norma Ayu Anggraini . A.Md
Bendahara Penerimaan : Iwan Arianto, S.H
Pejaba Pembuat Anggaran Belanja Pegawai:Nurhasanah, A.Md.,S.H
Staf Pengelola : Awaluddin Nur, S. H.I
2. Setelah ada Pejabat Sekretaris Definitif maka Dibentuk Kembali Tim Pengelola Dipa Pengadilan Agama Bontang Nomor W17-A6/613/KU.01/V/2023. tanggal 03 Mei 2023
Dengan rincian Sebagai Berikut:
Kuasa Pengguna Anggaran :Yuri Adi Dharma, S.Kom. Pejabat Pembuat Komitmen : Yuri Adi Dharma, S.Kom.
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM:Ana Syuryaningrum,S.H.
Bendahara Pengeluaran :Norma Ayu Anggraini . A.Md
Bendahara Penerimaan : Iwan Arianto, S.H
Pejaba Pembuat Anggaran Belanja Pegawai: Fathul Majid, S.H.I
Staf Pengelola : Awaluddin Nur, S. H.I

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 04
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA BONTANG 652081

Tgl Data : 23/10/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 23/10/23 10:25 AM
Halaman : 2
lap_ira_face_satker_komparatif

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	62,000,000	47,000,000	15,000,000	76	62,000,000	44,500,000	17,500,000	70
C	PEMBIAYAAN				0				0

Keterangan :

FINAL

BONTANG, 23 Oktober 2023
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

YURI ADI DHARMA
198501172006041001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (652081) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tgl Data : 23/10/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 23/10/23 10:25 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	33,164,900	0	33,164,900	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	33,164,900	0	33,164,900	
JUMLAH ASET	33,164,900	0	33,164,900	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	33,164,900	0	33,164,900	0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	5,000,000	0	5,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	38,164,900	0	38,164,900	
JUMLAH KEWAJIBAN	38,164,900	0	38,164,900	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	(5,000,000)	0	(5,000,000)	0.00
JUMLAH EKUITAS	(5,000,000)	0	(5,000,000)	()
JUMLAH EKUITAS	(5,000,000)	0	(5,000,000)	()
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	33,164,900	0	33,164,900	

Keterangan :
FINAL

BONTANG, 23 Oktober 2023
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

YURI ADI DHARMA
198501172006041001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (652081) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tgl Data : 23/10/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 23/10/23 10:26 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	33,164,900	0
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	33,164,900
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	5,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	47,000,000
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	45,187,500	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	1,467,910
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	3,190,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	13,870,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	28,127,500
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	40,000,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,200,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	3,267,910	0
JUMLAH			131,820,310	131,820,310

Keterangan :

FINAL

BONTANG, 23 Oktober 2023

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

YURI ADI DHARMA

198501172006041001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (652081) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tgl Data : 23/10/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 23/10/23 10:26 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	47,000,000
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	45,187,500	0
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	3,190,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	13,870,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	28,127,500
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,800,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	35,000,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,200,000	0
JUMLAH			92,187,500	92,187,500

Keterangan :

FINAL

BONTANG, 23 Oktober 2023

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

YURI ADI DHARMA

198501172006041001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (652081) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tgl Data : 23/10/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 23/10/23 10:23 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	45,187,500	50,635,500	(5,448,000)	(10.759)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	45,187,500	50,635,500	(5,448,000)	(10.759)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	45,187,500	50,635,500	(5,448,000)	(10.759)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	3,267,910	900,000	2,367,910	263.101
Beban Barang dan Jasa	40,000,000	38,000,000	2,000,000	5.263
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	10,200,000	9,600,000	600,000	6.25
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (652081) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tgl Data : 23/10/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 23/10/23 10:23 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	53,467,910	48,500,000	4,967,910	10.243
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(8,280,410)	2,135,500	(10,415,910)	(487.75)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(8,280,410)	2,135,500	(10,415,910)	(487.75)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(8,280,410)	2,135,500	(10,415,910)	(487.75)

Keterangan :

FINAL

BONTANG, 23 Oktober 2023

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

YURI ADI DHARMA

198501172006041001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (652081) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tgl Data : 23/10/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 23/10/23 10:24 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(8,280,410)	2,135,500	(10,415,910)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,280,410	(5,217,500)	8,497,910	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(5,000,000)	(3,082,000)	(1,918,000)	-
EKUITAS AKHIR	(5,000,000)	(3,082,000)	(1,918,000)	-

Keterangan :

FINAL

BONTANG, 23 Oktober 2023

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

YURI ADI DHARMA

198501172006041001